



Belum Dihuni

HASIL Pemeriksaan Badan Periksa Keuangan (BPK) menemukan, sebanyak 5.108 unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi baik melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan Subsidi Selisih Angsuran/Bunga (SSA/SSB) belum dimanfaatkan oleh debitur atau 'pemilik asli'. Rumah-rumah tersebut tidak dihuni, dialihkan atau proses dialihkan kepada pihak lain.

Berdasarkan pemeriksaan BPK terkait kinerja pengelolaan KPR FLPP dan SSA/SSB, dari 5.108 unit rumah tersebut, sebanyak 538 unit merupakan hasil cek fisik oleh tim, sedangkan 4.570 unit berasal

dari laporan PT Bank Tabungan Negara Tbk (Tbk) selaku bank pelaksana utama program KPR subsidi pemerintah.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR), debitur wajib memanfaatkan rumah sejahtera secara terus menerus dalam waktu satu tahun.

"Akibatnya, pencapaian tujuan program pemerintah dalam memberikan bantuan penyediaan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kurang efektif," tulis BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (I)HPS I Tahun 2017, dikutip Selasa (3/10). (cnn)